

**PENGUATAN KOORDINASI FUNGSIONAL RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) UNTUK PEMBANGUNAN BERBASIS IPM
(Studi Kasus di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)**

***STRENGTHENING THE COORDINATION FUNCTION OF LOCAL
GOVERNMENT WORK PLAN (RKPD) FOR DEVELOPMENT BASED IPM
(Case study in Sambas District of West Kalimantan)***

Suwarli

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri,
Jl. Kompleks Taman Makam Pahlawan No. 8, Kalibata, Pamcoran, Jakarta Selatan, Indonesia
email: war_suwarli@yahoo.com

Diserahkan: 9/02/2017, Diperbaiki: 24/04/2017, Disetujui: 24/05/2017

Abstrak

Pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja instansi pemerintah dan pembangunan nasional yang diwujudkan dalam bentuk program pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – Juni 2016. Lokasi penelitian di Kabupaten Sambas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tingkat penguatan koordinasi fungsional terhadap dokumen perencanaan tahunan RKPD Kabupaten Sambas sejak tahap awal penyusunan, evaluasi pelaksanaan, dan evaluasi hasil yang berorientasi pada percepatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik analisis data menggunakan pendekatan triangulasi dan data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penguatan koordinasi fungsional RKPD berbasis IPM di Kabupaten Sambas termasuk kedalam kategori kuat. Pada tahap awal penyusunan memiliki skor 2.33, tahap evaluasi pelaksanaan memiliki skor 2.32 dan tahap evaluasi hasil memiliki skor 2.30. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses koordinasi dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Sambas sudah memiliki kinerja yang baik. Sinergitas dan koordinasi yang efektif antar internal birokrasi menjadi salah satu kunci keberhasilannya..

Kata Kunci: Koordinasi Fungsional, IPM, Pembangunan

Abstract

Achievement of the Human Development Index is one of the success performance indicator of government agencies and national development are realized in the form of the development program set out in planning documents, such as the Local Government Work Plan. This study was conducted in March-June 2016. The research location in Sambas District, The purpose of this study are analyzed the level of strengthening functional coordination on local government work plan documents include are preparation, implementation, and result evaluation to accelerate of HDI achievement. The approach of this study is qualitative method were analyzed use triangulation and descriptive statistical. The results showed that the level of strengthening functional coordination of RKPD based on HDI in Sambas Regency is classified as strong category. In the preparation stages has a score of 2.33, the implementation evaluation stage has a score of 2.32 and the evaluation stage of the results have a score of 2.30. These results indicate that the process of coordination in the preparation RKPD in Sambas district already has a good performance. Synergy and effective coordination among the internal bureaucracy is a key to success ..

Keywords: Functional Coordination, IPM, Development

PENDAHULUAN

Kabupaten Sambas merupakan salah satu wilayah perbatasan di Indonesia dengan panjang perbatasan negara 97 km (BPS 2015) letak geografisnya berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Wilayah perbatasan saat ini memasuki paradigma baru pengembangan wilayah. Sebagai wilayah yang muncul akibat globalisasi maupun desentralisasi kebijakan, terjadi pergeseran paradigma keamanan

menuju kesejahteraan. Karakteristik yang berbeda dengan wilayah lain (immobilitas faktor produksi, biaya transaksi dan delay, sistem ekonomi yang berbeda, isu institusi, penetapan perwilayahan dan peran sektor informal) mendorong fungsi ekonomi wilayah tersebut pada sisi internal maupun eksternal (Kurniadi 2009).

Wilayah perbatasan memiliki kompleksitas permasalahan sehingga membutuhkan perencanaan

pengembangan wilayah yang komprehensif (Rustiadi dan Dardak 2008). Wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan yang strategis, yaitu kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, maupun pertahanan keamanan. Berkenaan dengan kebutuhan hidup ini, yang kemudian masyarakat perbatasan membuat slogan “Garuda di Dadaku” “Malaysia di Perutku”. Hal ini bisa dimaklumi karena kedekatan atas aksesibilitas pasokan kebutuhan primer sebagai tuntutan hajat hidup mereka. Pemenuhan hajat hidup yang layak ini digambarkan sebagai hasil kinerja pembangunan manusia. Manusia adalah modal sejati kekayaan bangsa sehingga pembangunan yang berfokus pada manusia diposisikan sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri.

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). United National Development Program memperkenalkan konsep Pembangunan Manusia, sebagai paradigma baru model pembangunan. Ada 3 (tiga) pilihan manusia yang sangat esensial untuk dipenuhi dalam pembangunan yaitu: pilihan untuk hidup sehat dan berumur panjang, pilihan untuk memiliki ilmu pengetahuan; dan pilihan untuk mempunyai akses ke berbagai sumber yang diperlukan agar dapat memenuhi standar kehidupan yang layak (*a decent standard of living*).

Potret capaian IPM Kabupaten Sambas sebesar 55,8 menempati posisi IPM terendah (rangking 14 dari 14 kab/kota se-Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 1999). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yacoub (2012), menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemiskinan di Kabupaten Sambas periode 2005-2010 yaitu sebesar 12,90%, dimana nilai ini berada diatas rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 11,90. Kemiskinan menjadi persoalan mendasar dalam proses pembangunan. Menurut Sjaifii (2009), kemiskinan tidak terlepas dari peranan pemerintah dan swasta yang mengalokasikan investasi maupun belanja daerahnya untuk meningkatkan kualitas modal manusia. Tingkat kesehatan dan pendidikan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Adanya hubungan penting antara IPM dan kapasitas pendapatan produktif (Dewi *et.al.* 2017). Pemerataan pendapatan per kapita menurut Putong (2009) dapat mendorong meningkatnya indeks pembangunan manusia.

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja pemerintah dalam pembangunan adalah capaian IPM diwujudkan dalam bentuk program yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Pasal 263 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah) terdiri atas: RPJPD; RPJMD; dan RKPd. Alokasi belanja daerah yang tersusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPd), haruslah berorientasi terhadap peningkatan kualitas modal manusia (IPM). RKPd yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen yang bersifat operasional menjalankan visi misi kepala daerah untuk eksekusi janji-janji programnya.

Kabupaten Sambas bangkit dan terus berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan. Rumusan RPJMD 2011-2016 Kabupaten Sambas menempatkan IPM sebagai prioritas utama pembangunan menuju Kabupaten Sambas yang terunggul di Kalimantan Barat. Pembangunan manusia di Kabupaten Sambas berdasarkan publikasi dari BPS 2015 menunjukkan kemajuan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari angka capaian IPM yakni dari nilai sebesar 59,81 (2010) menjadi 63,28 (2014). Selama kurun waktu 5 (lima) tahun Pencapaian IPM Kabupaten Sambas menempati peringkat ke 6 (2014) se Provinsi Kalimantan Barat (sambas.go.id). Sehingga hasil usaha mempercepat gerakan capaian IPM tersebut Pemerintah Kabupaten Sambas diberi predikat KALBAR “*Top Movers*” 2010-2014. Capaian konsep perencanaan pembangunan berbasis IPM tersebut perlu diapresiasi. Oleh karena itu penelitian terkait penguatan koordinasi fungsional RKPd untuk pembangunan berbasis IPM dinilai sangat strategis untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat penguatan koordinasi fungsional terhadap dokumen perencanaan tahunan RKPd Kabupaten Sambas sejak tahap awal penyusunan, evaluasi pelaksanaan, dan evaluasi hasil yang berorientasi pada percepatan pencapaian IPM.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif serta menggunakan berbagai metode atau pendekatan pada satu fokus kajian (Rahmat 2009). Sementara itu studi kasus digunakan untuk membatasi fokus dan subjek penelitian pada hal-hal atau kasus yang terkait dengan penguatan koordinasi fungsional RKPd untuk pembangunan berbasis IPM. Studi kasus yang dilakukan yaitu bersifat studi kasus mendalam (*intrinsic case study*). Hal ini dilakukan tidak dengan maksud untuk menempatkan kasus tersebut mewakili dari kasus lain, tetapi tidak menutup kemungkinan pada lokasi yang berbeda mengalami kasus yang sama.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan penelitian

yaitu pada bulan Maret sampai dengan Juni 2016. Kabupaten Sambas dipilih menjadi lokasi penelitian karena memiliki keunikan terkait kinerja capaian IPM dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang mengalami peningkatan dibandingkan wilayah lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Angka capaian IPM Kabupaten Sambas yakni dari nilai sebesar 59,81 (2010) menjadi 63,28 (2014). Selama kurun waktu 5 (lima) tahun pencapaian IPM Kab Sambas menempati peringkat ke-6 (2014) se Provinsi Kalimantan Barat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan terdiri dari karakteristik informan, keterlibatan dalam penyusunan RKPD, mekanisme koordinasi dan informasi terkait evaluasi hasil RKPD. Data sekunder yang dikumpulkan berupa beberapa laporan tahunan SKPD, data demografi, peraturan daerah dan data lainnya yang mendukung tujuan penelitian. Data primer dikumpulkan melalui survey dengan alat bantu angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan sumber data (Emzir 2008). Angket ini diberikan kepada informan dalam hal ini adalah pejabat struktural SKPD. Pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 42 orang yang berasal dari Dinas atau Badan dan Kecamatan (UPT, BLUD dan RSUD). SKPD yang dipilih adalah unit organisasi yang secara representatif dapat memberikan informasi dan terlibat secara langsung dalam sinergitas penyusunan perencanaan dokumen RKPD. Data sekunder diperoleh dari penelusuran hasil penelitian sejenis, regulasi dan buku-buku literatur terkait perencanaan pembangunan baik dari SKPD dan Badan Pusat Statistik.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data (Moleong 2008). Data yang bersifat kuantitatif dianalisis dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif. Dalam melakukan analisis terhadap koordinasi fungsional rancangan awal SKPD dan analisis penguatan koordinasi penguatan fungsional penyusunan RKPD, indikator yang telah dibangun terkait koordinasi dan penguatan fungsional RKPD untuk langkah pertama dilakukan penentuan bobot, nilai dan skor. Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi indikator penguatan koordinasi dengan skala 1 sampai 5 (1 = tidak penting, 5 = sangat penting). Langkah kedua adalah menentukan nilai. Nilai diperoleh dari hasil kuantifikasi dari data yang diperoleh. Rentang nilai berkisar antara 1 sampai dengan 3. Nilai Skor diperoleh berdasarkan hasil bobot

dikali nilai (bobot x nilai). Total nilai skor untuk indikator menunjukkan bahwa semakin nilainya mendekati 3, semakin baik dan jika semakin kecil atau mendekati 1 berarti indikator tersebut kurang baik atau banyak kelemahannya. Selanjutnya, tiap-tiap skor pada indikator diklasifikasikan kedalam 5 (lima) kategori atau atribut yang dapat menunjukkan kekuatan masing-masing indikator dengan klasifikasi (1) Sangat kuat dengan persentase pencapaian skor 91-100%; (2) Kuat dengan persentase pencapaian skor 76-90%; (3) Cukup kuat dengan persentase pencapaian skor 61-75%; (4) Kurang kuat dengan persentase pencapaian skor 51-60% dan (5) Tidak kuat dengan persentase pencapaian skor kurang dari 50%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sambas

Terdapat tiga indikator terpenting yang dijadikan tolak ukur untuk menyusun IPM Pertama, usia panjang yang diukur dengan rata-rata lama hidup penduduk atau angka harapan hidup di suatu negara. Kedua, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang bisa membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga). Ketiga, penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan daya belinya untuk tiap wilayah. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menurut Lumbantoruan *et.al* (2014) merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup sedangkan kualitas non fisik melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya (Putra dan Ulupui 2015).

Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Sambas dapat dilihat melalui dua aspek yaitu kecepatan dan status pencapaian. Status IPM Kabupaten Sambas pada tahun 2015 telah mengalami peningkatan dari nilai sebesar 63,28 menjadi 64,14. Keberhasilan dan kegagalan dalam pembangunan termasuk pencapaian IPM di dalamnya tidak terlepas dari peran pimpinan atau kepala daerah. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Fajriana (2014) bahwa kedudukan yang strategis dimiliki kepala daerah sebagai unsur pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan titik sentral dan dinamisator atau yang menimbulkan jalannya seluruh kegiatan pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Ada hal yang menarik pada periode IPM 2013-2014 dimana nilai IPM seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan. Untuk Kabupaten Sambas menurun sekitar 3 poin dari 66,81 menjadi 63,28. Penurunan IPM ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kesejahteraan secara agregat untuk masyarakat di Kabupaten Sambas (Lampiran 1). Penurunan tingkat kesejahteraan dapat berupa penurunan kualitas kesehatan, penurunan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat rata-rata. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Hasil penelitian Setiawan dan Hakim (2013) menunjukkan bahwa produk domestik bruto berpengaruh positif terhadap IPM, karena peningkatan produk domestik bruto akan memperbaiki kesejahteraan penduduk. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik

(kab/kota) suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Berdasarkan data BPS 2015 diketahui bahwa struktur perekonomian di Kabupaten Sambas utamanya ditunjang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tergantung pada sektor tersebut. Jika dikaitkan antara penurunan IPM periode 2013-2014 dengan laju pertumbuhan PDRB per kapita sektoral di Kabupaten Sambas diketahui bahwa untuk PDRB per kapita sektoral di Kabupaten Sambas khususnya untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga mengalami penurunan (Lampiran 2). Penurunan laju pertumbuhan PDRB per kapita yaitu utamanya terjadi pada subsektor pertanian dan kehutanan sedangkan untuk subsektor perikanan mengalami peningkatan sekitar 12% jauh lebih besar dibandingkan peningkatan laju pertumbuhan PDRB per kapita

Tabel 1. Analisis Penguatan Koordinasi Fungsional Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Sambas, 2016.

No	Indikator	Skor	Persentase (%)
1	Koordinasi pengendalian rancangan awal RKPD		
	Keterlibatan dalam rapat	2,63	87,87
	Keaktifan dalam memberikan ide-ide/pendapat dalam rapat	2,18	72,72
	Kepatuhan mentaati segala peraturan/kesepakatan yang berlaku	2,47	82,57
	Keterlibatan dalam memberikan koreksi terhadap kesepakatan yang berlaku	2,04	68
	Rata-rata	2,33	77,79
2	Mekanisme koordinasi pengendalian pelaksanaan RKPD		
	Kegiatan dalam pertemuan rutin	2,38	79,54
	Kegiatan rapat konsultatif	2,27	75,75
	Kegiatan konfirmasi	2,40	80,00
	Kegiatan rapat teknis	2,25	75,00
	Rata-rata	2,32	77,57
3	Mekanisme koordinasi evaluasi hasil RKPD		
	Kegiatan kunjungan ke lapangan	2,34	78,03
	Kegiatan pembahasan/pemecahan masalah	2,34	78,03
	Kegiatan pelaporan	2,22	74,24
	Rata-rata	2,30	76,76
4	Mekanisme Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan		
	Koordinasi pengendalian rancangan awal RKPD	2,33	77,79
	Koordinasi pengendalian pelaksanaan RKPD	2,32	75,57
	Koordinasi evaluasi hasil RKPD	2,30	76,76
	Rata-rata	2,31	76,70
	Total Nilai Rata-Rata	2,32	77,21

Sumber : Data Primer diolah, 2016.

agregat semua sektor yang nilainya kurang dari 1%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi membawa dampak salah satunya terhadap perubahan pendapatan masyarakat (Dewi *et al.* 2017).

Peningkatan nilai PDRB pada subsektor perikanan telah menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas merupakan wilayah pesisir dengan potensi sumberdaya ikan yang cukup besar. Sektor perikanan dapat diandalkan sebagai salah satu motor penggerak pembangunan. Besarnya potensi perikanan di Kabupaten Sambas juga telah di dukung oleh beberapa program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program nasional Minapolitan berbasis perikanan tangkap pada tahun 2011. Program ini merupakan salah satu program untuk peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

Penguatan Koordinasi Fungsional Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Penguatan koordinasi fungsional RKPD di Kabupaten Sambas dalam kajian ini dibagi menjadi empat tahapan, yaitu tahapan pengendalian rancangan awal RKPD, mekanisme koordinasi pengendalian pelaksanaan RKPD, mekanisme koordinasi evaluasi hasil RKPD dan mekanisme pelaksanaan koordinasi pembangunan. Koordinasi menurut Mirwan (2013) dapat diartikan sebagai usaha untuk mengatur dan menyelaraskan setiap pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama oleh beberapa orang atau badan tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Pengendalian rancangan awal RKPD adalah untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan RKP, RPJMD serta Renstra- Renja SKPD. Pengendalian pelaksanaan RKPD dimaksudkan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD. Tujuan mekanisme evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah khususnya pembangunan berbasis IPM.

Dari setiap tahapan penguatan koordinasi fungsional RKPD memiliki indikator-indikator yang diukur yang dapat mencerminkan sisi perencanaan pembangunan berbasis IPM. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa penguatan koordinasi pengendalian rumusan rancangan awal RKPD dalam perencanaan pembangunan berbasis IPM memiliki skor rata-rata 2,33 (77,79%). Nilai ini membuktikan tingkat efektifitas yang bagus dari strategi koordinatif

pengendalian antar-dokumen perencanaan khususnya dalam mengendalikan rumusan awal kebijakan RKPD. Penguatan koordinasi tersebut mencerminkan kinerja pengendalian rancangan awal RKPD sesuai arah konsistensi yang positif antara perencanaan dan penganggaran antar dokumen perencanaan yang ada.

Terkait dengan mekanisme koordinasi pelaksanaan pembangunan skor rata-rata 2,32 (77,57%) atau masuk kedalam klasifikasi "kuat". Pengendalian pelaksanaan RKPD Pemerintah Kabupaten Sambas dinilai cukup berhasil dalam mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan RKPD dan menjamin bahwa prioritas pembangunan tahunan daerah dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD. Posisi atribut nilai kuat yang bagus adalah mendekati angka atau poin 90. Oleh karena itu nilai 77,57% ini masih perlu perhatian atau penguatan yang lebih sehingga kekuatan koordinasi semakin baik. Untuk tahapan mekanisme koordinasi evaluasi hasil RKPD mempunyai skor rata-rata 2,30 (76,76%) atau masuk kedalam klasifikasi "kuat", namun demikian nilai ini masih perlu penguatan karena nilai ideal adalah 90.

Penguatan koordinasi fungsional RKPD untuk pembangunan berbasis IPM sebagaimana yang telah diuraikan di atas, meliputi mekanisme koordinasi pengendalian rancangan awal RKPD, koordinasi pengendalian pelaksanaan, dan koordinasi evaluasi hasil RKPD. Nilai skor pada tahapan ini adalah sebesar 2,31 (76,70%) masuk kedalam klasifikasi "kuat". Kinerja Kabupaten Sambas dalam melakukan koordinasi fungsional khususnya yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Sambas dinilai efektif, kuat dan konsisten. Hanya saja nilai pencapaian persentase total sebesar 76,70% masih belum optimal, karena nilai yang baik untuk kriteria "kuat" mendekati angka 90%.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa proses koordinasi dalam penyusunan RKPD lingkup Kabupaten Sambas sudah memiliki kinerja yang baik. Kaitannya dengan potensi wilayah Kabupaten Sambas sebagai wilayah pesisir dengan potensi sumber daya ikan yang besar maka arahan penyusunan RKPD untuk mencapai IPM yang baik maka harus disesuaikan potensi wilayahnya. RKPD sebagai basis penyusunan alokasi belanja daerah sangat berpengaruh terhadap pencapaian IPM. Hasil penelitian Putra dan Ulupui (2015), menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus secara konsisten mampu meningkatkan IPM. Hal yang sama juga dikatakan oleh Harahap (2017) bahwa dana alokasi khusus dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pencapaian target IPM. Gagalnya proses pembangunan menurut hasil Muhammad (2008) karena adanya biaya transaksi atau biaya dalam membuat keputusan. Hal ini bisa saja terjadi dalam proses perencanaan

penyusunan RKPD sehingga dapat menyebabkan kegagalan pencapaian IPM. Namun dengan hasil analisis yang menunjukkan kinerja dan koordinasi yang efektif hal ini tidak terjadi dalam proses perencanaan. Kinerja koordinasi yang baik dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Sambas maka berdasarkan hasil penelitian tidak menutup kemungkinan pembangunan di sektor perikanan di wilayah Kabupaten Sambas dapat dicapai sebagai salah satu motor penggerak perekonomian wilayah ini. Hal ini sesuai dengan beberapa hasil penelitian (Anna dan Fauzi 2013; Nugraha dan Setyaji 2013; Kurniawan *et al.* 2014; Hariyanto *et al.* 2008) yang menyebutkan bahwa potensi sumberdaya perikanan di Indonesia secara keseluruhan memiliki potensi yang besar dan mampu menjadi penggerak dan pemicu pertumbuhan ekonomi daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pembangunan manusia di Kabupaten Sambas mengalami fluktuatif dalam periode 2010 – 2015, namun secara agregat mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari angka capaian IPM yang terus meningkat dalam periode 2010 – 2015. Terjadinya penurunan nilai capaian IPM di Kabupaten Sambas menunjukkan adanya penurunan tingkat kesejahteraan secara agregat untuk masyarakat di kabupaten. Penurunan tingkat kesejahteraan yang dicerminkan oleh nilai IPM berkorelasi dengan penurunan laju pertumbuhan nilai PDRB per kapita. Perekonomian Kabupaten Sambas yang tergantung pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tergantung pada sektor tersebut, sehingga pertumbuhan pada sektor ini sangat berpengaruh terhadap nilai capaian IPM. Kaitannya dengan sub sektor perikanan, dimana pada periode tahun 2013-2014 semua sub sektor cenderung mengalami penurunan pertumbuhan PDRB namun untuk sub sektor perikanan tetap meningkat, ini menunjukkan sub sektor perikanan lebih stabil dan dapat diandalkan sebagai sub sektor unggulan. Peningkatan nilai PDRB pada subsektor perikanan telah menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas merupakan wilayah pesisir dengan potensi sumberdaya ikan yang cukup besar.

Hasil analisis penguatan koordinasi fungsional RKPD menunjukkan bahwa koordinasi lingkup SKPD di Kabupaten Sambas sudah memiliki kinerja yang baik, yaitu dengan rata-rata nilai skor secara keseluruhan adalah 2,32 (77,21%) dan masuk kedalam klasifikasi “kuat”. Kinerja yang baik ini dapat menjadi modal utama dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas sebagai wilayah pesisir dan perbatasan dengan mengalokasikan PAD dan DAK

kedalam sektor (perikanan, pariwisata, industri dan lain lain) yang berkaitan dengan pesisir sehingga dapat menjadikan Kabupaten Sambas menjadi salah satu wilayah perbatasan yang berkembang.

Kinerja Kabupaten Sambas dalam melakukan koordinasi fungsional khususnya yang dikomandoi oleh Bappeda Kabupaten Sambas dinilai efektif/kuat dan konsisten. Hanya nilai 77,21 masih belum optimal, karena nilai yang baik untuk kriteria “kuat” mendekati angka 90. Sebagaimana tujuan mekanisme penguatan koordinasi fungsional untuk menjamin perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebijakan umum dan program pembangunan daerah berbasis IPM yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh daerah (Muktiali 2009). Koordinasi pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasil RKPD dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD untuk pembangunan berbasis IPM.

Rekomendasi

Untuk mencapai Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi di Kabupaten Sambas tidak semata-mata hanya pada pertumbuhan ekonomi tapi dilihat dari berbagai aspek kebijakan pembangunan salah satunya persoalan penguatan koordinasi perencanaan tahunan daerah (RKPD). Pencapaian target kinerja nilai IPM Kabupaten Sambas perlu didukung oleh seluruh program kerja yang terintegrasi di seluruh SKPD. Pemerintah Kabupaten Sambas. Komitmen Kepala Daerah sangat diperlukan dalam mendorong SKPD mengawal capaian nilai IPM yang dilaksanakan melalui strategi penguatan koordinasi. Keberhasilan penguatan koordinasi ini perlu diperkuat dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dengan mengarahkan Dana CSR dalam mencapai peningkatan IPM Kabupaten Sambas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan kami Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri atas dukungannya memberi kesempatan melakukan penelitian di Kabupaten Sambas. Penulis juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sambas khususnya kepada yang terhormat bapak Sudaryanto Kepala Bappeda Kabupaten Sambas atas dukungannya dalam mensupport data dan membantu mendiskusikan penelitian ini dengan tim TAPD dan para pejabat struktural SKPD lainnya yang diikutsertakan dalam diskusi sesuai instrumen penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Z, Fauzi A. 2013. "Neraca Ekonomi Sumber Daya Perikanan Pantai Utara Jawa.:*Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* Vol 3 (No 1).
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas. 2015. *Laporan Tahunan Bappeda Kabupaten Sambas 2015*. Sambas
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. 2015. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas Menurut Lapangan Usaha 2011 – 2015*. Kabupaten Sambas : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. Sambas.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. Jakarta
- Dewi F S, Indrajaya IGB dan Djayastra IK. 2017. "Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Perkapita dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Inflasi Kota Denpasar Periode Tahun 1994 – 2013." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.6 (No 1).
- Dewi N, Yusuf Y dan Iyan RY. 2017. "Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau." *Jurnal JOMFekon* Vol 4 (No. 1)
- Emzir. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fajriana. 2014. "Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser." *Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman*
- Harahap, Riva Ubar. 2017. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/Kota Propinsi Sumatera Utara." *Jurnal KITABAH* Vol.1 (No. 1).
- Hariyanto T, Mulyono S B, John Haluan dan Iskandar BH. 2008. "Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan Berbasis Komoditas Potensial Di Teluk Lampung." *Jurnal Sainstek Perikanan*. Vol.4 (No 1).
- Iqbal, Muhammad. 2008. "Konstelasi Institusi Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program PIDRA." *Jurnal Ekonomi Pembangunan FE UMS*, Vol. 9 (No. 1).
- Kurniadi, D. 2009. "Strategi Pengembangan Wilayah perbatasan AntarNegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat." *Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro Semarang*.
- Kurniawan A, Fajar M, Apriliazmi I, dan Nugraha A. 2014. "Identifikasi Status Konservasi Hiu Tangkapan Sampung di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pulau Bangka dan Belitung." *Prosiding Simposium Pengelolaan Perikanan Tuna Berkelanjutan 2014*. WWF – KKP. Bali : WWF.
- Lumbantoruan, EP dan Hidayat, P. 2014. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi di Indonesia (Metode Kointegrasi)." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Volume 2 (No 2).
- Mirwan, M. 2013. "Optimalisasi Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai negara." *Jurnal eJournal Administrasi Negara* Vol. 1 (No 2).
- Moleong J. Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. T. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Muktiali, Mohammad. 2009. "Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Manfaat Program Pembangunan di Kota Semarang." *Jurnal Riptek* Vol 3 (No 2).
- Nugraha B dan Setyadji B. "Kebijakan Pengelolaan Hasil Tangkapan Sampungan Tuna Longline di Samudera Hindia." *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*. Vol 5 (No 2).
- Putong, Iskandar. 2009. *Pengantar Mikro dan Makro Edisi 4*. Mitra Wacana M. Jakarta.
- Putra, P.G.M dan Ulupui, I.G.K.A. 2015. "Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11.3
- Rahmat, PS. "Penelitian Kualitatif." *Jurnal Equilibrium Universitas Brawijaya* Vol .5 (No. 9).
- Rustiadi, E. dan Dardak, E.E. 2008. *Agropolitan Strategi Pengembangan Pusat Pertumbuhan pada Kawasan Perdesaan*. Crestpent Press. Bogor.
- Setiawan, M B dan Hakim, A.2013. "Indeks Pembangunan Manusia Indonesia." *Jurnal Economia*, Volume 9 (No 1).
- Sjafii, A. 2009. "Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990 – 2004." *Journal of Indonesia Applied Economics*. Vol. 3 (No. 1).
- Yacoub, Y. 2012. "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat." *Jurnal Eksos Politeknik Negeri Pontianak* Vol. 18 (No. 3).

Lampiran I. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota 1996 – 2015

Kab/Kota	1996	1999	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sambas	55,7	55,8	59,3	60,8	61,90	62,13	63,01	63,73	64,36	64,93	65,80	66,19	66,81	63,28	64,14
Bengkayang	0,0	0,0	63,1	63,9	64,60	65,70	66,32	66,81	67,18	67,55	67,98	68,50	69,38	64,40	64,65
Landak	0,0	0,0	61,6	63,7	64,20	66,08	66,43	66,74	67,29	67,55	68,16	69,05	69,58	63,59	64,12
Pontianak	63,5	60,9	64,0	66,3	66,90	67,19	67,43	67,90	68,55	68,75	69,07	69,42	70,13	62,78	63,37
Sanggau	65,3	61,0	62,2	65,5	66,20	66,98	67,64	67,86	68,20	68,55	68,97	69,50	70,30	62,06	63,05
Ketapang	63,8	60,8	63,6	64,4	65,20	65,40	66,02	66,84	67,50	67,89	68,63	69,05	69,74	63,27	64,03
Sintang	64,8	60,3	61,6	64,3	65,10	65,66	66,89	67,44	68,00	68,31	68,77	69,14	69,81	63,19	64,18
Kapuas Hulu	63,4	60,8	62,7	67,4	68,20	68,70	69,26	69,41	69,85	70,03	70,38	70,52	70,97	62,90	63,73
Sekadau	0,0	0,0	0,0	63,8	64,50	65,29	65,75	66,13	66,65	66,99	67,52	68,47	68,99	61,98	62,34
Melawai	0,0	0,0	0,0	63,0	63,80	65,97	67,61	67,91	68,44	68,67	69,01	69,39	69,86	62,89	63,78
Kayong Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	64,16	66,19	64,69	65,27	65,38	65,75	66,19	66,83	58,52	60,09
Kubu Raya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	66,31	66,92	67,56	68,06	68,86	69,32	64,52	65,02
Kota Pontianak	64,6	64,7	67,6	69,1	69,50	71,03	71,59	72,08	72,42	72,96	73,43	74,21	74,64	76,63	77,52
Kota Singkawang	0,0	0,0	0,0	64,2	64,70	65,46	67,61	68,02	68,37	68,86	69,21	69,77	70,66	69,84	70,03
KALIMANTAN BARAT	63,0	60,6	62,9	65,4	66,20	67,08	67,53	68,17	68,79	69,15	69,66	70,31	70,93	64,89	65,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2015.

Lampiran 2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (%), 2011 – 2015.

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,20	5,34	8,11	7,46	8,89
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	11,68	4,80	9,04	6,63	8,98
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	4,03	5,46	0,70	-5,63	4,07
	3. Perikanan	9,43	8,91	3,47	15,39	9,02
B.	Pertambangan dan Penggalian	21,37	25,95	17,90	23,55	18,30
C	Industri Pengolahan	9,14	7,28	8,54	10,01	8,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,42	7,32	5,22	14,45	6,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,11	4,28	-0,41	8,44	5,75
F	Konstruksi	18,71	17,58	20,08	20,69	12,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,18	5,57	8,84	10,25	10,57
H	Transportasi dan Pergudangan	10,81	10,41	11,58	10,86	9,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,60	11,83	10,17	11,49	13,11
J	Informasi dan Komunikasi	9,00	6,90	5,69	9,79	12,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,18	20,67	19,60	17,06	9,56
L	Real Estate	10,61	12,54	11,42	10,10	8,90
M,N	Jasa Perusahaan	12,63	9,82	9,70	8,48	11,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5,23	28,40	15,40	18,55	16,76
P	Jasa Pendidikan	12,89	11,14	12,59	12,64	10,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,16	10,65	10,03	11,41	10,39
R,S,T,U	Jasa Lainnya	10,46	3,77	7,95	10,52	9,26
	Produk Domestik Regional Bruto	11,27	8,74	10,19	10,91	10,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2015.